



Evaluation of Ecotourism Development Based on Community Based Tourism (CBT): A Study of the Nyarai Ecotourism Area, Padang Pariaman Regency

Alya Mahlil^{1,*}, Nora Eka Putri¹

*** alyamahli501@gmail.com**

¹ Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to evaluate the development of ecotourism based on Community Based Tourism (CBT) at the Nyarai Ecotourism Area, managed under the coordination of the Tourism, Youth, and Sports Office of Padang Pariaman Regency, and to identify the internal and external constraints that hinder its development. The background of this study is rooted in the fact that although the Nyarai Ecotourism Area has received national and international recognition for its community-based conservation model, it still faces persistent problems in infrastructure, land status, fluctuating visitor numbers, and limited human resource capacity. This research employed a qualitative descriptive method with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving informants from the Tourism Office, the village government, the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), local business actors, and visitors, selected through purposive sampling. Data validity was examined using source triangulation, and data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The evaluation was carried out using William N. Dunn's six evaluation criteria (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness), while the constraints were analyzed using Hansen and Mowen's constraint theory. The results show that the development of Nyarai Ecotourism has been effective, equitable, responsive, and appropriate in empowering the local community, but still faces structural challenges in efficiency and adequacy due to limited budget, facilities, and managerial capacity. The main internal constraints identified are human resources, facilities, and budget, particularly following the discontinuation of the Special Allocation Fund (DAK) since 2024, while the external constraints consist of protected forest status and complex inter-agency licensing regulations. This study recommends that the local government formulate a long-term development roadmap, diversify funding sources, and strengthen human resource capacity to ensure the sustainability of community-based ecotourism development.

Keywords: community based tourism; ekowisata; evaluasi kebijakan; kebijakan pariwisata; Nyarai

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu pendekatan pengembangan pariwisata alam yang banyak digunakan adalah ekowisata berbasis Community Based Tourism (CBT). Damanik dan Weber (2006) mendefinisikan ekowisata ke dalam tiga perspektif, yaitu sebagai produk berupa atraksi berbasis sumber daya alam, sebagai pasar yang diarahkan pada pelestarian lingkungan, dan sebagai pendekatan pengembangan yang memanfaatkan sumber daya pariwisata secara ramah lingkungan.

Senada dengan itu, Latupapua (2007) menyatakan bahwa ekowisata merupakan konsep yang menghubungkan pariwisata dengan konservasi, sehingga sering dipahami sebagai pariwisata berwawasan lingkungan yang menonjolkan tanggung jawab terhadap alam.

Adapun Community Based Tourism (CBT), menurut Suansri (dalam Izana & Susanti, 2020), merupakan bentuk pariwisata yang memperhitungkan keberlanjutan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan politik dalam sebuah komunitas, dengan lima dimensi keberhasilan yaitu ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. World Tourism Organization/WTO (2005) dan Suansri (2003) menegaskan bahwa prinsip dasar CBT antara lain mengakui dan mengembangkan kepemilikan komunitas atas pariwisata, melibatkan anggota komunitas dalam setiap aspek kegiatan, serta memastikan keuntungan dibagikan secara adil kepada seluruh anggota komunitas. Model pengelolaan seperti ini menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan penikmat manfaat kegiatan wisata, sejalan dengan prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”.

Berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan CBT mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Yutaro (2025) dalam penelitiannya di Kenagarian Pariangan menemukan bahwa penerapan CBT memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi dan budaya masyarakat, meskipun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan SDM, anggaran, dan fasilitas. Irwan dkk. (2025) di Nagari Painan Selatan menemukan bahwa pendekatan CBT mampu meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, sementara Sutan dkk. (2024) di Desa Teluk menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberlanjutan pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang menerapkan konsep ini, dengan Kawasan Ekowisata Nyarai di Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung, sebagai destinasi unggulannya. Kawasan yang dikelola bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ini telah meraih sejumlah penghargaan tingkat nasional maupun pengakuan internasional dari European Outdoor Conservation Association atas keberhasilannya mengubah pola pemanfaatan hutan masyarakat dari aktivitas penebangan kayu menjadi aktivitas ekonomi berbasis konservasi dan pariwisata.

Meskipun demikian, studi-studi terdahulu tersebut umumnya lebih banyak menyoroti aspek partisipasi dan dampak ekonomi masyarakat secara deskriptif, namun belum banyak yang mengevaluasi pengembangan kawasan secara komprehensif menggunakan kriteria evaluasi kebijakan formal. Dalam hal ini, William N. Dunn (2003) menjelaskan bahwa evaluasi pada dasarnya adalah upaya menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari suatu hasil kebijakan, yang dapat dinilai melalui enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Di sisi lain, keberhasilan suatu kebijakan atau program pengembangan juga tidak dapat dilepaskan dari kendala yang menyertainya. Hansen dan Mowen (2005) mengelompokkan kendala berdasarkan sumbernya menjadi kendala internal, yaitu hambatan yang berasal dari dalam lingkungan organisasi seperti sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran, serta kendala eksternal, yaitu hambatan yang berasal dari luar organisasi seperti kondisi lingkungan dan regulasi. Kedua kerangka teori inilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pengembangan Kawasan Ekowisata Nyarai secara lebih menyeluruh, sekaligus mengaitkannya dengan sumber kendala yang dihadapi pengelola.

Padahal, hasil observasi awal di Kawasan Ekowisata Nyarai menunjukkan bahwa di balik berbagai pencapaian yang diraih, kawasan ini masih menghadapi persoalan nyata, seperti kerusakan akses jalan dan jembatan menuju lokasi wisata, status sebagian lahan sebagai tanah ulayat yang memperlambat proses pembangunan, fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, keterbatasan keterampilan pengelola, serta dihentikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2024 yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung pengembangan fisik

kawasan. Kesenjangan antara capaian keberhasilan CBT di satu sisi dan persoalan struktural yang masih membayangi keberlanjutannya di sisi lain menunjukkan perlunya sebuah evaluasi yang sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis evaluasi pengembangan Kawasan Ekowisata Nyarai berbasis Community Based Tourism oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan dari William N. Dunn (2003), dan (2) mengidentifikasi kendala internal maupun eksternal yang menghambat pengembangan kawasan tersebut menggunakan teori kendala dari Hansen dan Mowen (2005). Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan hasil evaluasi keenam kriteria tersebut dengan akar kendala yang melatarbelakanginya, sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai keterkaitan antara capaian dan tantangan dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di kawasan hutan lindung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis fenomena evaluasi pengembangan Kawasan Ekowisata Nyarai berbasis Community Based Tourism berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman, terutama pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, serta Desa Wisata Nyarai Nagari Salibutan Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti, meliputi Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dan Fungsional Adyatama Kepariwisataan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, Ketua dan Wakil Ketua Pokdarwis Ekowisata Nyarai, Plt. Wali Nagari Salibutan, pelaku usaha lokal, masyarakat sekitar kawasan, serta wisatawan yang pernah berkunjung.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, data kunjungan wisatawan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan. Instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat perekam, kamera, dan catatan lapangan. Uji keabsahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai informan. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menurut teori Ratnaningtyas et al (2023) dikategorikan menjadi tiga alur yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pengembangan Kawasan Ekowisata Nyarai Berbasis Community Based Tourism oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan hasil penelitian dianalisis menggunakan enam kriteria evaluasi William N. Dunn (2003) yang saling berkaitan yaitu efektivitas sebagai pijakan awal untuk melihat ketercapaian tujuan, efisiensi dan kecukupan yang menjelaskan penggunaan sumber daya, pemerataan dan responsivitas yang menyoroti distribusi manfaat dan tindak lanjut aspirasi masyarakat, serta ketepatan sebagai penilaian akhir kesesuaian program dengan tujuan yang hendak dicapai.

Efektivitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengembangan Kawasan Ekowisata Nyarai berbasis CBT tergolong cukup baik. Hal ini tercermin dari terbentuknya sistem pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung melalui Pokdarwis, beralihnya mata pencaharian sebagian masyarakat dari penebangan kayu hutan menjadi pemandu wisata dan pelaku usaha, serta diraihnya penghargaan tingkat nasional dan pengakuan internasional dari

European Outdoor Conservation Association di bidang konservasi hutan. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran Dinas Pariwisata yang secara konsisten menjalankan fungsi koordinasi, monitoring, dan pendampingan meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Meskipun demikian, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Pokdarwis, pengembangan kawasan ini masih berada pada tahap “maju” dan belum sepenuhnya mencapai kemandirian penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas yang telah dicapai pada dasarnya bertumpu pada permasalahan efisiensi dan kecukupan yang akan dibahas selanjutnya, yaitu keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan kapasitas sumber daya manusia pengelola, sehingga ketiga kriteria ini perlu dipahami sebagai satu rangkaian yang saling memengaruhi.

Efisiensi

Kriteria efisiensi menyoroti hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengembangan kawasan menghadapi tantangan cukup besar, terutama setelah dihentikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2024 sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Sebelumnya, DAK memberikan kontribusi pembiayaan sekitar Rp2,5 miliar per tahun untuk pembangunan fisik kawasan. Dengan dihentikannya dana tersebut, Dinas Pariwisata kini lebih berfokus pada fungsi pembinaan dan monitoring dibandingkan pembiayaan langsung.

Di sisi lain, Pokdarwis telah berupaya menerapkan efisiensi melalui sistem bagi hasil yang jelas dari retribusi wisatawan sebesar Rp30.000 per kunjungan, yang dialokasikan untuk honor pemandu (Rp100.000–Rp150.000 per hari) dan kas kelompok untuk perawatan jalan dan jembatan. Sistem ini menunjukkan kemandirian finansial yang cukup baik di tingkat masyarakat, meskipun pengelolaan administrasi keuangannya masih dilakukan secara sederhana akibat keterbatasan kapasitas manajerial pengelola.

Kecukupan

Kriteria kecukupan digunakan untuk menilai apakah program yang dilaksanakan telah memenuhi kebutuhan dasar pengembangan kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi fasilitas baru mencapai sekitar 70 persen layak digunakan. Ketiadaan fasilitas MCK di bagian atas jalur trekking, akibat tingginya biaya pengangkutan material ke lokasi yang sulit dijangkau, serta kerusakan jembatan akses utama akibat bencana banjir, menjadi permasalahan yang menurunkan kenyamanan dan keamanan wisatawan sekaligus berdampak pada penurunan kunjungan.

Dari sisi pembinaan SDM, Dinas Pariwisata telah mengadakan pelatihan pengelolaan wisata secara berkala, namun frekuensinya yang hanya sekali dalam setahun dinilai belum cukup mengimbangi kebutuhan peningkatan kapasitas pengelola. Dengan demikian, kecukupan program pengembangan kawasan masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek fasilitas fisik, infrastruktur akses, maupun pembinaan sumber daya manusia.

Perataan

Kriteria perataan menyoroti sejauh mana manfaat pengembangan telah didistribusikan secara adil antarkelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekowisata telah dirasakan oleh berbagai kelompok, mulai dari pemuda yang berperan sebagai pemandu wisata, kelompok perempuan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bundo Gamaran dalam pengolahan produk asam kandis, hingga pemilik lahan yang dilalui jalur wisata dan memperoleh bagian dari retribusi pengunjung. Pelibatan kelompok perempuan ini menunjukkan bahwa pemerataan manfaat tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga kesetaraan gender dalam pengelolaan ekowisata.

Namun, pemerataan ini belum berlaku menyeluruh. Dari 21 anggota Pokdarwis yang terdaftar, hanya sekitar 6 hingga 7 orang yang aktif terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung, sehingga perataan yang dicapai saat ini bersifat parsial dan sangat bergantung pada tingkat partisipasi aktif individu dalam kegiatan kepariwisataan.

Responsivitas

Kriteria responsivitas menilai kemampuan pengelola dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat maupun wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan responsivitas yang cukup baik melalui mekanisme yang saling melengkapi: Dinas Pariwisata melakukan monitoring rutin dua kali sebulan, Pokdarwis memanfaatkan media digital seperti Google My Business untuk menampung masukan wisatawan, dan Pemerintah Nagari secara konsisten hadir dalam pertemuan koordinasi serta menjaga kesesuaian kegiatan wisata dengan kearifan lokal.

Meskipun demikian, responsivitas ini masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran, sehingga tindak lanjut yang bersifat fisik dan berskala besar, seperti perbaikan jembatan dan jalan akses, belum dapat segera direalisasikan. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi akar permasalahan yang berulang di berbagai dimensi evaluasi.

Ketepatan

Kriteria ketepatan menilai kesesuaian hasil program dengan tujuan yang hendak dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan Kawasan Ekowisata Nyarai sudah cukup tepat sasaran, terutama melalui kebijakan yang mengharuskan tenaga kerja dan pemandu wisata berasal dari masyarakat Nagari Salibutan sendiri, sejalan dengan prinsip dasar CBT “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Ketepatan program juga tercermin dari mekanisme evaluasi berkala yang melibatkan musyawarah masyarakat, ninik mamak, hingga kecamatan sebelum pelaksanaan pembangunan.

Penghargaan tingkat nasional dan internasional yang diraih Pokdarwis menjadi indikator bahwa arah pengembangan kawasan telah sesuai dengan tujuan pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, ketepatan program ini masih perlu ditopang oleh perencanaan penganggaran jangka panjang yang lebih sistematis agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pengembangan Kawasan Ekowisata Nyarai

Berbagai keterbatasan pada dimensi efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas di atas pada dasarnya bersumber dari kendala yang lebih mendasar. Merujuk pada teori Hansen dan Mowen (2005), kendala tersebut dikelompokkan menjadi kendala internal dan kendala eksternal.

Kendala Internal

Kendala internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam lingkungan organisasi pengelola, meliputi aspek sumber daya manusia (SDM), fasilitas, dan anggaran.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam penelitian ini pada aspek SDM, kualitas pengelola masih belum sepenuhnya memadai, baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan teknis seperti penguasaan bahasa asing dan manajemen administrasi, sehingga Dinas Pariwisata secara rutin mengadakan pelatihan pelayanan kepariwisataan. Rendahnya tingkat partisipasi aktif anggota Pokdarwis turut memperlihatkan bahwa kendala SDM tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi juga kualitas dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan kawasan secara profesional.

Fasilitas

Pada aspek fasilitas, kendala utama adalah ketiadaan fasilitas MCK yang memadai di jalur atas trekking akibat tingginya biaya pengangkutan material, serta kerusakan akses jalan dan jembatan akibat bencana. Kendala fasilitas ini erat berkaitan dengan kendala anggaran, sebab tanpa anggaran yang memadai, perbaikan fasilitas tidak dapat dilakukan, dan tanpa fasilitas yang layak, jumlah kunjungan sulit ditingkatkan secara konsisten.

Anggaran

Pada aspek anggaran, kendala paling signifikan adalah dihentikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2024, yang menjadi titik temu dari hampir seluruh permasalahan pada dimensi efisiensi, kecukupan, dan responsivitas. Kondisi ini menyebabkan pengembangan kawasan saat ini lebih banyak bergantung pada kemandirian Pokdarwis dan

bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) yang sifatnya tidak permanen.

Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar lingkungan organisasi pengelola, meliputi aspek kondisi lingkungan dan regulasi.

Kondisi Lingkungan

Pada aspek kondisi lingkungan, status Kawasan Ekowisata Nyarai sebagai bagian dari hutan lindung di bawah pengawasan Balai Kehutanan Provinsi membatasi jenis pembangunan fisik yang dapat dilakukan, sehingga infrastruktur seperti jembatan hanya dapat dibangun secara sementara menggunakan material kayu. Bencana banjir yang merusak jembatan akses utama turut menjadi faktor eksternal yang berdampak luas, mulai dari penurunan efektivitas program hingga penurunan pendapatan pelaku usaha lokal di sepanjang jalur tersebut.

Regulasi

Pada aspek regulasi, pengembangan kawasan memerlukan koordinasi intensif dengan Balai Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan (DLHKPP), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Meskipun kawasan ini telah memperoleh izin pemanfaatan dari Perhutani, proses koordinasi antarinstansi yang memerlukan waktu tetap menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, pelaku usaha lokal masih menghadapi kendala perizinan produk, seperti sertifikasi BPOM dan hak paten, yang diperlukan untuk mengembangkan produk olahan asam kandis secara lebih luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pengembangan Kawasan Ekowisata Nyarai berbasis Community Based Tourism oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kawasan ini telah menunjukkan capaian yang cukup baik pada dimensi efektivitas, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, yang tercermin dari beralihnya mata pencaharian masyarakat, pengakuan nasional dan internasional yang diraih, serta terjalannya mekanisme partisipatif dalam perencanaan dan evaluasi program. Namun, dimensi efisiensi dan kecukupan masih menjadi tantangan struktural, terutama akibat dihentikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2024 dan keterbatasan fasilitas pendukung di kawasan wisata.

Kendala yang menghambat pengembangan kawasan terdiri dari kendala internal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran, serta kendala eksternal, yaitu status kawasan sebagai hutan lindung dan kompleksitas regulasi lintas instansi. Kedua kelompok kendala ini saling berkaitan dan menjadi penjelas utama mengapa dimensi efisiensi dan kecukupan belum mencapai hasil optimal, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan bukan penanganan yang bersifat parsial.

Sebagai rekomendasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman perlu menyusun roadmap pengembangan jangka panjang serta mencari sumber pembiayaan alternatif yang lebih berkelanjutan, baik melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, kerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR, maupun pengajuan kembali skema pendanaan khusus pariwisata kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah bersama Pokdarwis juga perlu menyusun skala prioritas pembangunan fasilitas serta menyediakan mekanisme dana tanggap darurat pascabencana. Selain itu, diperlukan pembinaan yang lebih intensif terkait peningkatan kapasitas SDM, khususnya manajemen keuangan dan penguasaan bahasa asing, serta pendampingan bagi pelaku usaha lokal dalam pengurusan sertifikasi produk agar manfaat ekonomi ekowisata dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut model pembiayaan alternatif bagi kawasan ekowisata berbasis masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan lindung.

Pernyataan Apresiasi

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Nagari Salibutan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Ekowisata Nyarai, para pelaku usaha lokal, serta masyarakat dan wisatawan Kawasan Ekowisata Nyarai yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang atas dukungan akademik dalam penyelesaian penelitian yang menjadi dasar penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kausar, J., Sutan, A. J., Sazeta, M., Rahmadani, S., Bela, D. R. S., Aisah, U., & Rizal, A. N. (2024). Pengembangan pariwisata Desa Teluk berbasis potensi lokal menggunakan prinsip Community Based Tourism. *Journal of Rural Community Development*, 1(2), 85–107.
- Anggriani, R., Febriana, W., Prasetyo, R., & Komala, R. (2023). Ekowisata melalui konsep Community Based Tourism. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 4(3), 137–151.
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan ekowisata*. Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR) UGM & ANDI.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Terjemahan). Gadjah Mada University Press.
- Febrian, A. W., & Suresti, Y. (2020). Pengelolaan wisata kampung Blekok sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis Community Based Tourism Kabupaten Situbondo. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 139–148.
- Fitra, Z., Banowati, N., Deshima, R., Sahmir, A., Dewi, R. K., & Derizal, D. (2025). Peran pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) dalam pengelolaan ekowisata Nyarai, Kabupaten Padang Pariaman. *PETA-Jurnal Pesona Pariwisata*, 4(1), 20–26.
- Fitriani, N., Fathurrahim, F., & Martayadi, U. (2024). Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan daya tarik ekowisata mangrove Bagek Kembar di Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Responsible Tourism*, 4(2), 567–572.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2005). *Management accounting* (7th ed.). South-Western College Publishing.
- Irwan, I., Siska, F., Melia, Y., Elvawati, E., Yatim, Y., Sulkaisi, N., & Nefilinda, N. (2025). Strategi pengembangan potensi pariwisata melalui Community Based Tourism (CBT) di Nagari Painan Selatan. *Jurnal Pustaka Mitra*, 5(3), 106–111.
- Nurwahyuliningsih, E., Prihatini, L., Pusnita, I., Itisham, M. H., & Fanagung, A. (2024). Pendekatan Community Based Tourism (CBT) dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 463–474.
- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataaan*.
- Riana, M. A., Jannah, M., Syahnur, K. N. F., & Endang, A. H. (2024). Pengembangan smart eco tourism di Desa Wisata Tabo-Tabo melalui konsep Community Based Tourism. *Jurnal Widya Laksmi*, 4(2), 137–142.
- Sahara, L. S., Abidin, J., & Hasan, R. O. (2025). Pengembangan paket wisata edukasi live in sebagai strategi pemberdayaan masyarakat Desa Sukamandi Masagi, Sagalaherang, Subang. *Madaniya*, 6(3), 1587–1597.
- Sasili, A. S. A. (2023). Peran strategis Dinas Pariwisata sebagai salah satu aktor pengembangan pariwisata pantai (Studi Kabupaten Gunungkidul dari perspektif ilmu pemerintahan).

- Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 481–496.
- Yulianto, Y., Meilinda, S. D., Fahmi, T., Hidayati, D. A., & Inayah, A. (2022). Penerapan Community Based Tourism (CBT) di Desa Merak Belantung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam mewujudkan desa ekowisata. *Jurnal Abdi Insani*, 9(1), 9–19.
- Yutaro, S. S., & Jumiati, J. (2025). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) dalam pengelolaan desa wisata di Kenagarian Pariangan. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 4(1), 43–51.